



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan
Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Skripsi

Diajukan untuk Ujian Sidang Jenjang Sarjana
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Oleh

Vincent Jansen

2012330036

Bandung

2017



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 451/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan
Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Skripsi

Oleh

Vincent Jansen

2012330036

Pembimbing

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Bandung

2017

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Hubungan Internasional



Tanda Pengesahan Skripsi



Nama : Vincent Jansen
Nomor Pokok : 2012330036
Judul : Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan
Terhadap Kebijakan Luar Negeri Indonesia

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Rabu, 24 Juni 2015
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota
Dr. Atom Ginting Munthe, MS.

Sekretaris

Idil Syawfi. SIP, M.Si

Anggota

Mangadar Situmorang, Ph.D.

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo, M.Si



Pernyataan

Nama : Vincent Jansen Junaedi
NPM : 2012330036
Jurusan/Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional
Judul : Dampak rivalitas AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada abad ke-21

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 22 Juni 2017



Vincent Jansen

Abstrak

Nama : Vincent Jansen

NPM : 2012330036

Judul : Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia pada abad ke-21

Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian dari penelitian mengenai apa dampak dari kompetisi AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan teori *balance of power* oleh Kenneth Watz, diikuti dengan teori *balance of threat* yang dikemukakan oleh David Novotny dan Stephen M. Walt. dan konsep *hedging* oleh Leah Sherwood.

China semenjak dibawah kepemimpinan Deng Xiaoping telah bertransformasi menjadi sebuah negara dengan kekuatan besar yang dapat menyaingi pengaruh AS, khususnya di Asia. Persaingan AS-China di berbagai bidang akhirnya memasuki fase *proxy war* di Laut China Selatan. China melihat Laut China Selatan adalah jalan menuju masa depannya sebagai sebuah kekuatan global, sementara AS yang telah menancapkan pengaruhnya di Asia Tenggara sejak akhir Perang Dunia II melihat upaya China ini mengancam pengaruhnya di Asia Tenggara. Kedua negara bahkan sempat terlibat dalam bentrokan dalam beberapa kejadian di Laut China Selatan akibat perbedaan kepentingan mereka, walaupun belum sampai menjadi konflik terbuka.

Sementara, Indonesia sebagai salah satu pemain utama di Asia Tenggara merasa kehadiran militer China dan AS di Asia Tenggara mengancam perdamaian dan keharmonisan di Asia Tenggara. Indonesia sebagai pemimpin alami ASEAN merasa perlu untuk terlibat dalam mengatur kembali keseimbangan antara China dan AS. Berdasarkan persepsi Indonesia, China sekarang menjadi ancaman bagi kestabilan di Asia Tenggara, sehingga secara alami akan mendekat ke AS. Tetapi, Indonesia juga memiliki pengalaman buruk dengan AS membuat Indonesia juga berhati-hati dalam mendekati diri ke Washington. Selain itu, China sebagai kekuatan ekonomi kedua setelah AS dengan tawaran-tawaran bantuan ekonomi China adalah sesuatu yang sulit untuk ditolak bagi Indonesia. Penulis tertarik untuk meneliti dampak rivalitas China dan AS terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dalam upaya memaksimalkan kepentingan nasional Indonesia.

Kata kunci: AS, China, Laut China Selatan, Indonesia, Pengaruh, *Balance of Threat*, Kebijakan luar negeri

Abstract

Name : Vincent Jansen

NPM : 2012330036

Title : The effect of US-China Competition in the South China Sea towards Indonesian Foreign Policy

The purpose of this study is to answer the research question of the effect of US-China competition in the South China Sea towards Indonesian Foreign Policy. The research is done in a qualitative manner, by using the balance of power theory by Kenneth Waltz, followed by the balance of threat theory by David Novotny, and Stephen M. Walt. along with the concentric circle concept Leonard C. Sebastian, and the concept of hedging by Leah Sherwood.

Ever since China under the leadership of Deng Xiaoping, China has transformed into a nation with a big power that could match the US influence, especially in Asia. The competition between USA-China in many sectors have finally brought to a proxy war phase in the South China Sea. China sees the South China Sea is her path to the future as a global power, while the US who has planted her influence in Southeast Asia since the end of World War II sees China's attempt is threatening her influence in Southeast Asia. Both countries did manage got into a clash in a few events in the South China Sea due to there difference. Although this haven't been gone into an open conflict, the chances of becoming an open conflict exists. If it happens, it will not just be a loss to the two countries but also the Southeast Asia region as well.

Meanwhile, Indonesia as one of the key players in Southeast Asia feels the existence between the Chinese and US military in Southeast Asia could threaten the peace and harmony in Southeast Asia. Indonesia as a natural leader of ASEAN feels the need to get involved to reset the balance between China and Indonesia. According to Indonesian perception, China is a threat now for the stability of Southeast Asia, so it's natural to be closer to the US. However, Indonesia al hasl a bad experience with the US makes Indonesia cautious in trying to move closer to Washington. Other than that, China as the second strongest economy after the US along with her economic aid is something to hard to resist for Indonesia. The writer is interested to research on the effect of the rivalry between the US and China towards Indonesia's foreign policy in order to maximalize Indonesia's national interest.

Keywords: AS, China, South China Sea, Indonesia, Influence, Balance of Threat, Foreign Policy

Kata Pengantar

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan saya kekuatan dan ketabahan selama proses penyusunan tugas akhir skripsi yang berjudul, “Dampak Kompetisi AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia”.

Penulisan skripsi ini diajukan sebagai sebuah penelitian dan prasyarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Katholik Parahyangan, Bandung.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk memaparkan dampak dari rivalitas AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia sebagai “pemimpin alami” di ASEAN. Saya harap penelitian ini dapat memberikan informasi akademisi mengenai perkembangan kebijakan luar negeri Indonesia bagi yang tertarik untuk mempelajari kebijakan luar negeri Indonesia terkait kompetisi antara AS-China.

Dalam proses penelitian ini, penulis kerap menemukan tantangan dan kendala, tetapi berkat rahmat yang diberikan oleh Tuhan dan dukungan besar keluarga dan sahabat penulis dapat menyelesaikannya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Mangadar Situmorang, Ph.D. selaku pembimbing yang telah dengan sabra membantu saya dalam menyelesaikan penelitian, kepada orang tua dan kepada teman-teman yang telah memberikan dukungan. Penulis menyadari sekali bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga sangat diharapkan kritik, saran dan, rekomendasi yang dapat dijadikan proses perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Bandung, 22 Juni 2017

Vincent Jansen

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Abstract.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Daftar Singkatan.....	vii
Daftar Gambar.....	viii
BAB 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.2.1 Deskripsi Masalah Penelitian.....	7
1.2.2 Pembatasan Masalah Penelitian.....	10
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	11
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2 Kegunaan Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Pemikiran dan kajian Pustaka.....	12
1.5.1 Kajian Pustaka.....	12
1.5.2 Kerangka Pemikiran.....	14
1.6 Metode Penelitian.....	28
1.7 Sistematika Penelitian.....	30
BAB 2 Hubungan AS dan China di dalam persaingan global.....	32
2.1 Rivalitas AS dan China.....	32
2.2 Laut China Selatan.....	43
2.3 Pandangan AS terkait Laut China Selatan.....	59
2.4 Pandangan China terkait Laut China Selatan.....	52
2.5 Konflik AS dan China di Laut China Selatan.....	63

BAB 3 Posisi Indonesia di dalam ASEAN dan persepektif Indonesia terhadap AS dan China.....	66
3.1. Indonesia sebagai kekuatan Besar Asia Tenggara.....	66
3.2. Pandangan Indonesia terhadap AS.....	73
3.3. Pandangan Indonesia terhadap China.....	82
Bab 4 Dampak Rivalitas AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia.....	93
4.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia terhadap Laut China Selatan.....	93
4.1.1 Kebijakan Luar Negeri Indonesia sebelum pemerintahan Jokowi.....	93
4.1.2 Kebijakan Luar Negeri Indonesia pada pemerintahan Jokowi.....	97
4.2 Tantangan tawaran ekonomi China.....	104
BAB 5 Kesimpulan.....	106
Daftar Pustaka.....	110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan anggaran militer China 1994-2007.....	41
Gambar 2.2	Peta Sistem Pertahanan <i>Island Chains</i> China.....	49
Gambar 2.3	Klaim negara-negara di Asia Tenggara berdasarkan UNCLOS dengan klaim sepihak China.....	51
Gambar 2.4	Konsep Perencanaan The New Silk Road.....	59
Gambar 3.1	Perdagangan China-Indonesia 1990-2016.....	93
Gambar 4.1	Besaran realisasi investasi di Indonesia pada triwulan IV tahun 2016.....	114

Daftar Singkatan

SLOC = Sea Lines of Communications

AS = Amerika Serikat

AL = Angkatan Laut

RRC = Republik Rakyat China

PLA = People's Liberation Army

UNCLOS = United Nations Convention on Law of the Sea

OBOR = One Belt One Road

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terletak di persimpangan banyak kawasan menjadikan Indonesia sebagai salah satu lokasi konflik kepentingan oleh berbagai pihak luar. Letak Indonesia yang menghubungkan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang membentuk jalur pelayaran yang disebut *sea lines of communications* (SLOC).¹ Fungsi dari jalur pelayaran ini digunakan untuk sebagai jalur perdagangan laut internasional. Jalur ini dianggap sudah dipakai sejak ribuan tahun lalu. Selat Malaka dan Selat Karimata menjadi *choke point* penting SLOC. Sejarah telah membuktikan bahwa Nusantara merupakan lokasi banyak konflik-konflik negara lain dengan Indonesia sebagai medan perangnya. Invasi Jawa pada tahun 1811 oleh Inggris yang membuat otoritas Hindia Belanda harus pindah tangan dari Belanda ke Inggris, yang pada skala global merupakan bagian dari Perang Napoleonik antara Inggris dan Perancis.² Pada masa Perang Dunia II, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang menganggap Selat Lombok sebagai “tol kapal selam” dan menaruh banyak kapal patrol di selat tersebut.³ Saat

¹ Khalid, Nazery, *Sea Lines Under Strain*, MIMA, <http://www.mima.gov.my/mima/wp-content/uploads/sealinesunderstrain.pdf>, diakses pada tanggal 30 Oktober 2016

² Carey, Peter, *The British in Java 1811-1816: A Javanese Account*, Oxford University Press, Oxford, 1992

³ Beach, Edward L., *Around the World Submerged: The Voyage of the Triton*, Naval Institute Press, Annapolis, 1962, hal. 228.

Perang Dingin, Indonesia menjadi ajang persaingan AS dan Uni Soviet yang keduanya melihat posisi vital Nusantara untuk dapat mengoperasikan kekuatan AL mereka di Samudera Hindia, terutama saat selat Lombok dan Ombai dianggap memiliki kedalaman yang sesuai untuk kapal-kapal selam mereka.⁴ Belum lagi kemampuan untuk dapat mengontrol pengiriman barang-barang melalui kapal yang melalui perairan Indonesia. Mulai ramainya Selat Malaka memunculkan jalur-jalur alternatif yang semuanya melalui perairan Indonesia.⁵ Sehingga, posisi Indonesia vital dalam rivalitas global. Konflik-konflik tersebut menjadi tantangan berat Indonesia dalam menentukan kebijakan-kebijakan luar negerinya melalui doktrin “bebas dan aktif”. Hal ini kembali terjadi pada abad ke-21, dimana Indonesia terlibat di dalam persaingan global antara Amerika Serikat (AS) dengan Republik Rakyat China (RRC).

Sejak akhir Perang Dingin, hubungan AS-China naik turun seiring dengan kepentingan kedua negara. Dari 1991 sampai tahun 2001, hubungan keduanya menegang dalam banyak isu-isu dan insiden. Isu Tibet, dan Taiwan seringkali disebutkan oleh AS dalam beberapa kesempatan yang seringkali menyebabkan hubungan keduanya memburuk. Namun, kedua negara tetap menjalankan hubungan yang baik dalam beberapa bidang lainnya, terutama di bidang ekonomi. Tercatat nilai perdagangan AS-China dari \$33 miliar pada tahun 1992 menjadi

⁴ Polomka, Peter, *Ocean Politics in Southeast Asia*, Institute of Southeast Asian Studies, 1978, Singapura, hlm. 36.

⁵ Mohd Hazmi bin Mohd Rusli, *Maritime Highways of Southeast Asia: Alternative Straits?* RSIS Commentary, no. 024/2012, 10 Februari 2012, diakses pada tanggal 31 Oktober 2016, <http://www.rsis.edu.sg/wp->

lebih dari \$562 miliar pada tahun 2013.⁶ Tetapi, hubungan erat ini tidak menjamin persaingan antara China dan AS menyusut. Justru, dengan meningkatnya perekonomian China dan China mulai mengambil peran penting dalam tatanan global, rivalitas keduanya menjadi semakin menguat akibat persaingan politik dan ekonomi. Kompetisi ini muncul setelah pada awal tahun 2000-an di saat China dengan kebangkitan ekonominya yang luar biasa cepat mulai memperkuat pengaruh politik luar negerinya melalui kekuatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Semakin besarnya pengaruh China di kawasan Asia Timur dan Tenggara akan menyaingi pengaruh AS, yang tentunya apabila AS kehilangan supermasi tersebut akan berdampak buruk bagi kepentingan nasional AS di kawasan Asia Timur dan Tenggara.

Rivalitas ini menjadi semakin nyata dengan menguatnya aktivitas China di Laut China Selatan yang merupakan kawasan yang diperebutkan oleh banyak negara. China mengklaim sepihak seluruh wilayah Laut China Selatan sebagai milik China berdasarkan catatan sejarahnya. Tindakan sepihak ini menyebabkan protes keras dari negara-negara pengklaim lainnya. Selain China, terdapat Taiwan, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam sebagai pengklaim (*claimant*). Sementara, Singapura dan Indonesia bukan pengklaim (*non-claimant*), tetapi sangat merasakan dampak dari konflik tersebut.

AS yang tidak memiliki klaim apapun di dalam konflik ini, terlibat atas nama menjaga Laut China Selatan sebagai perairan internasional sambil menjamin

⁶ U.S. Department of State, *U.S. Relations with China*, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/18902.htm>, diakses pada tanggal 30 September 2016.

kehadiran AS di Asia Tenggara. Pemerintahan Obama menyatakan “pivot ke Asia” yang kembali menghadirkan kekuatan AS di Asia Timur dan Tenggara setelah AS fokus ke Timur Tengah sejak dimulainya Perang terhadap terorisme.⁷ Kembalinya AS memperbesar pergesekan kepentingan AS dan China yang memiliki dampak signifikan bagi negara-negara di kawasan, khususnya Indonesia. Bagi Indonesia, konflik Laut China Selatan memiliki dampak untuk terhadap keaman nasional Indonesia, hubungan dengan China, dan juga masa depan ASEAN.

ASEAN adalah sebuah organisasi regional satu-satunya yang telah berperan penting dalam menjaga perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara sejak tahun 1973. Organisasi ini memiliki peran penting dalam konflik ini. Konflik penyelesaian perebutan wilayah sudah biasa dihadapi ASEAN. Sebelumnya, ASEAN telah terlibat di dalam berbagai konflik regional yang menyangkut negara-negara anggotanya, seperti konflik Malaysia-Indonesia (Sipadan-Ligitan dan Ambalat), Vietnam-Kamboja (terkait konflik atas Preah Vihear). Pengalaman ini diharapkan dapat membuat ASEAN mampu menyelesaikan konflik yang sudah berlangsung berpuluh-puluh tahun dan menyebabkan banyak bentrokan. Hal ini terlihat dari keinginan negara-negara anggotanya yang terlibat membawa kasus ini ke tingkat ASEAN dan PBB. Tetapi, ASEAN tak mampu berbuat banyak dikarenakan perbedaan masing-masing anggota ASEAN dalam memandang China.⁸ Perbedaan

⁷ The Atlantic, *What Exactly Does It Mean That the U.S. Is Pivoting to Asia?*, 2013, <http://www.theatlantic.com/china/archive/2013/04/what-exactly-does-it-mean-that-the-us-is-pivoting-to-asia/274936/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2016.

⁸ BBC News, *Philippines to take South China Sea Row to Court*, 22 Januari 2013, diakses pada tanggal 1 Oktober 2016 melalui <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-21137114>.

ini tercermin di saat Kamboja menolak gagasan Filipina dan Vietnam untuk menyebut perselisihan klaim tumpang tindih ini di dalam pernyataan mereka.⁹

Dampak bagi Indonesia terletak pada dua hal penting. Satu rivalitas AS-China berdampak pada kapabilitas ASEAN yang memiliki kontribusi besar menjamin keamanan di Asia Tenggara. Apabila ASEAN gagal menjamin kestabilan di kawasan akan berdampak pada ASEAN kehilangan kredibilitasnya, yang tentunya berdampak pada politik luar negeri Indonesia. Kedua konflik Laut China Selatan secara tak langsung melibatkan Indonesia terkait dengan kedaulatan Republik Indonesia di perairan Natuna yang sebagiannya di klaim milik China, yang secara domestik dapat memberi tekanan untuk memihak penuh AS dan berada pada pengaruh AS sepenuhnya.

Indonesia memiliki posisi netral di dalam rivalitas AS-China di kawasan sebagai perwujudan doktrin “bebas dan aktif.” Sehingga tidak mungkin bagi Indonesia untuk menjadi aliansi dari salah satu kubu. Hanya saja kedekatan Indonesia dengan salah satu pihak di dalam konflik tertentu, tidak menjadi masalah bagi Indonesia, selama sesuai kepentingan nasional Indonesia. Pemikiran yang seperti itu yang memungkinkan hubungan luar negeri Indonesia pada saat sekarang lebih akrab dengan Amerika Serikat ketimbang China. Pandangan ini diambil dari beberapa elit politik luar negeri Indonesia yang memandang AS sebagai kekuatan

⁹ The New York Times, *China Stalls Move to Quell Asia Disputes Over Territory*, 19 November 2012, http://www.nytimes.com/2012/11/20/world/asia/china-and-cambodia-stall-move-to-quell-disputes-in-southeast-asia.html?_r=0, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

besar yang dapat dipercaya, sementara memandang China dengan perasaan curiga.¹⁰

Hubungan Indonesia-China membaik setelah Indonesia kembali membuka hubungan diplomatik China pada tahun 1990. Sebagian besar hubungan China-Indonesia dibangun atas dasar bidang perekonomian. China adalah rekan dagang terbesar bagi Indonesia. Tetapi hal tersebut, tidak menjamin hubungan yang lebih baik, terlebih lagi masalah klaim China di Laut China Selatan yang menyentuh sebagian wilayah laut Indonesia di Natuna. Tercatat, telah beberapa kali terjadi insiden pengejaran oleh kapal-kapal penjaga pantai China terhadap TNI AL yang sedang dalam operasi penangkapan nelayan-nelayan China yang berlayar di Natuna secara illegal.¹¹ Insiden di Natuna ini menyebabkan ketegangan di dalam hubungan Indonesia-China, walaupun masih menjalin hubungan dagang yang kuat. Sementara dengan AS, Indonesia banyak melakukan kerjasama di bidang keamanan. Mengingat posisi Indonesia yang terletak di jalur pelayaran internasional, AS merasa hubungan Indonesia-AS penting untuk menjamin kestabilan di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga menerima banyak bantuan AS berupa U.S. Agency of International Development (USAID). Tercatat bantuan USAID pada tahun 2015 sebesar \$150, 7 miliar.¹² Bantuan besar ini berperan besar dalam pembangunan di Indonesia dan pengembangan masyarakat Indonesia

¹⁰ Hamilton-Hart, Natasha dan Mcrae, *Indonesia: Balancing the United States and China, Aiming for Independence*, The United States Studies Centre, University of Sydney, November 2015, hlm. 1.

¹¹ Bloomberg, *Indonesia Detains Chinese Fishermen After S. China Sea Chase*, 21 Maret 2016, <http://www.bloomberg.com/news/articles/2016-03-21/indonesia-detains-chinese-fishermen-after-south-china-sea-chase>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

¹² USAID, *Result to Dollars: Indonesia*, <https://results.usaid.gov/indonesia#fy2015>, diakses pada tanggal 3 Oktober 2016

sendiri. Sehingga tak salah hubungan Indonesia lebih dekat dengan AS ketimbang dengan China.

Konflik tersebut kembali menguji kemampuan Indonesia untuk membuktikan kembali dirinya sebagai negara yang tak ingin memihak siapapun, tetapi ingin menciptakan perdamaian di kawasan Asia Tenggara sebagai wujud kepentingan utamanya. Kondisi tegang di ASEAN memicu ketidakstabilan di Asia Tenggara Indonesia. Saat-saat seperti ini Indonesia diharapkan akan menjadi pemain kunci untuk membawa kembali kestabilan di ASEAN dengan menyelesaikan konflik Laut China Selatan dengan jalan damai. Tetapi, tantangan-tantangan antara hubungan Indonesia dengan China dan AS di tengah upaya menjadi pemain utama di Asia Tenggara akan menjadi faktor penentu strategi kebijakan luar negeri Indonesia di ke depannya.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

1.2.1 Deskripsi Masalah Penelitian

Pokok permasalahan dari rivalitas kedua negara besar terhadap Indonesia adalah karena lokasi konflik Laut China Selatan terletak pada pintu depan Indonesia sendiri. Indonesia merasakan dampak terbesar dari konflik ini di dalam ASEAN dan juga di Natuna. Walaupun Indonesia bukan negara pengklaim, kehadiran China di Laut China Selatan mempersulit upaya pencarian solusi damai di Laut China Selatan. Juga kehadiran China di sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna juga mempertanyakan kapabilitas Indonesia dalam

mempertahankan kedaulatan negaranya, yang dapat mendorong Indonesia untuk melanggar doktrin bebas-aktif bila terdapat tuntutan keras dari publik Indonesia.

Laut China Selatan telah menjadi kawasan konflik selama berpuluh-puluh tahun lamanya, Selama itu konflik tersebut hanya sebuah konflik regional yang mengaitkan China dengan negara-negara pengklaim di Asia Tenggara. Masing-masing negara menggunakan klaim yang bermacam-macam, ada yang menggunakan peta zaman dahulu, bukti eksplorasi, peta era penjajahan, dan juga melalui UNCLOS.¹³ Banyaknya perbedaan ini membuat klaim tumpang tindih yang rumit yang seringkali mengganggu hubungan antar negara-negara yang terlibat. Telah disepakati bahwa persetujuan untuk menerapkan UNCLOS ditujukan untuk menyelesaikan konflik perbatasan laut antar negara-negara. Tetapi, dalam kasus ini UNCLOS dimanfaatkan oleh negara-negara yang berkonflik untuk memperluas daerah kedaulatannya. Lebih uniknya, China sebagai negara yang meratifikasi UNCLOS menolak poin-poin yang dicantumkan UNCLOS terkait Laut China Selatan dengan dalih mendasarkan kedaulatan atas Laut China Selatan berdasarkan *nine-dash line*. Dan menginginkan permasalahan di Laut China Selatan diselesaikan secara bilateral.

Banyak negara pengklaim yang menolak ide ini. Menurut mereka penyelesaian bilateral dengan China akan menjadi negosiasi dimana China mendominasi jalannya negosiasi. Oleh karena itu, negara-negara pengklaim lainnya membawa

¹³UNCLOS (United Nations Convention on Law of the Sea) adalah hukum internasional yang dibuat oleh para ahli hukum laut dari seluruh dunia. Diakses dari http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, pada tanggal 18 Oktober 2016.

isu ini ke tingkat ASEAN dan PBB. Penyelesaian secara multilateral diharapkan dapat mengimbangi China di meja negosiasi. PBB tidak memberikan respons sama sekali terkait konflik ini, bahkan menolak terlibat di dalam keputusan pengadilan arbitrase di Hague yang menolak klaim China sama sekali pada bulan Agustus lalu.¹⁴ ASEAN mengeluarkan *code of conduct* untuk mengurangi kemungkinan bentrokan antara kapal-kapal negara-negara pengklaim.¹⁵ Akan tetapi, *code of conduct* ini tidak diterima China yang terus mempertahankan klaimnya dengan terus menjalankan aktivitasnya di Laut China Selatan.

AS yang bukan negara pengklaim tetap melihat konflik Laut China Selatan merupakan hal yang krusial bagi AS mempertahankan kepentingannya di Asia Tenggara. AS mengharapkan Laut China Selatan sebagai perairan internasional agar dapat mempertahankan kebebasan berlayar disana yang dibutuhkan AS baik secara perdagangan dan militer. Bila kebebasan berlayar di Laut China Selatan tak terwujud, AS akan kesulitan menggerakkan aset-aset militer dan ekonominya antara Timur Tengah dan Asia Timur. AS mendukung Deklarasi Laut China Selatan dan Deklarasi ASEAN-China dalam *Conduct of Parties* di Laut China Selatan yang dibuat dan ditandatangani oleh ASEAN dan China di Phnom Penh, Kamboja pada 4 November 2002 sehingga diharapkan masalah ini dapat terselesaikan dengan damai. Akan tetapi, upaya China yang keras dalam mempertahankan klaimnya

¹⁴ South China Morning Post, *United Nations stresses separation from Hague tribunal*, 14 Juli 2016, <http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1989486/united-nations-stresses-separation-hague-tribunal>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016.

¹⁵ ASEAN, *DECLARATION ON THE CONDUCT OF PARTIES IN THE SOUTH CHINA SEA*, http://asean.org/?static_post=declaration-on-the-conduct-of-parties-in-the-south-china-sea-2, diakses pada tanggal 5 Oktober 2016

membuat AS tak yakin apabila konflik bisa diselesaikan di meja perundingan saja. Maka, AS memutuskan untuk melakukan pivot ke Asia untuk dapat menahan ekspansi China di Laut China Selatan. AS melakukan penempatan personel militer di Darwin. AS juga mengerahkan kapal-kapal perangnya di Laut China Selatan walaupun di bawah ancaman rudal anti-kapal China. Hal ini menambah ketegangan di Laut China Selatan.

Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara dan memiliki peran besar dalam pembentukan dan pengelolaan ASEAN selama hampir 50 tahun lamanya dipandang memiliki solusi yang baik untuk menjamin perdamaian di Asia Tenggara. Walaupun dalam sejarah Indonesia di era Perang Dingin, Indonesia memiliki kendala mempertahankan netralitasnya, kondisi Indonesia pada era reformasi memungkinkan Indonesia memiliki kemampuan dalam mempertahankan prinsip bebas-aktif sebagaimana semestinya. Indonesia melalui ASEAN memiliki keinginan untuk menyeimbangkan kehadiran kedua negara besar yang tengah membuat ketegangan di Asia Tenggara.¹⁶ Kemampuan Indonesia bisa saja menjadi alternatif untuk penyelesaian konflik Laut China Selatan dengan jalan yang damai atau setidaknya tidak memecah belah ASEAN.

1.2.2 Pembatasan Masalah penelitian

Penulis membatasi penelitian ini di dalam konteks rivalitas AS-China di Laut China Selatan karena rivalitas AS-China telah menjadi rivalitas global. Pembatasan sudut pandang akan terletak pada sudut pandang kebijakan luar negeri Indonesia

¹⁶ Anwar, Dewi Fortuna, *An Indonesian Perspective on the U.S. Rebalancing Effort toward Asia*, The National Bureau of Asian Research, hal. 3

dari tahun 2000-2016. Kurun waktu yang dibatasi penulis karena mengingat panjangnya konflik Laut China Selatan bila dijabarkan secara keseluruhan.

1.3 PERTANYAAN PENELITIAN

Dengan membaca topik dan penjelasan latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka terangkum pertanyaan penelitian yang akan dijawab oleh peneliti:

“Bagaimana dampak dari kompetisi antara Amerika Serikat dan China di dalam konflik Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia?”

1.4 TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1.4.1 TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak konflik Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang berperan penting di dalam ASEAN dan sempat mengalami ketegangan dengan China di perairan Natuna.

1.4.2 KEGUNAAN PENELITIAN

Kegunaan penelitian oleh penulis adalah, pertama, sebagai sumber akademik di dalam Universitas Katolik Parahyangan. Kedua, kontribusi dan bahan referensi baru untuk dunia pendidikan, khususnya bagi mereka yang tertarik untuk mengetahui bagaimana Indonesia menjalankan kebijakan luar negerinya di tengah rivalitas AS-China di Laut China Selatan.

Penulis juga menganggap penelitian ini penting untuk memperjelas sikap pemerintah Indonesia di dalam konflik Laut China Selatan. Seringkali ada prasangka bahwa Indonesia seharusnya mengambil sikap keras terhadap China seperti Filipina dan lebih serius meminta kehadiran AS di Asia Tenggara. Juga ada prasangka peningkatan aktivitas militer di Natuna sebagai keinginan Indonesia untuk terjun langsung ke dalam konflik tersebut. Akan tetapi, melakukan tindakan tersebut tidaklah mudah mengingat keinginan Indonesia bukanlah negara yang ingin memihak salah satu pihak dalam konflik tersebut. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran jelas kepada pembaca tentang bagaimana Indonesia berusaha menjalankan kebijakan luar negeri “bebas-aktif” dan tantangan-tantangan yang harus diterima dalam upaya menjalankan kebijakan tersebut.

1.5 KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada sub bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai posisi dari kajian ini terhadap kajian-kajian lainnya serta menjelaskan mengenai konsep dan kerangka pemikiran yang dipakai dalam penelitian ini.

1.5.1 KAJIAN PUSTAKA

Untuk melakukan penelitian ini, diperlukan sumber-sumber dari literatur-literatur yang sudah ada sebelumnya. Literatur ini membantu penulis dalam menentukan posisi dan menyusun penjelasan-penjelasan di dalam penelitian ini.

Literatur yang hendak digunakan pertama adalah jurnal yang berjudul *Pakistan Thorn in China-India-U.S. Relations* oleh Harsh V. Pant. Artikel ini menjelaskan

mengenai langkah-langkah Pakistan dalam menghadapi kehadiran AS dan China dalam memenuhi kepentingan nasionalnya menghadapi India.

Lalu, buku *Origins of Alliances* yang ditulis oleh Stephen M. Walt. Buku ini memberikan bukti kuat bahwa balance of power masih memiliki kekurangan untuk menjelaskan fenomena hubungan internasional yang terjadi di Timur Tengah. Walt meneliti pembentukan aliansi di Timur Tengah dari 1955 sampai 1979. Walt menyatakan bahwa pembentukan aliansi lebih didasarkan pada balance of threat daripada balance of power. Dari risetnya Walt juga mengatakan bahwa AS lebih unggul dari Uni Soviet di Perang Dingin dalam jumlah anggota aliansi karena kekuatan AS yang besar tidak dianggap ancaman oleh negara lain.

Sumber terakhir berasal dari sebuah jurnal berjudul *Towards a Fragmented Neighbourhood: Policies of the EU and Russia and their consequences for the area that lies between*. Jurnal yang ditulis oleh Laura Declour dan H. Kostanyan menggambarkan dilemma yang dihadapi negara-negara di Eropa Timur yang terjebak diantara pengaruh ekonomi Uni Eropa dan Russia. Dari jurnal ini, dijelaskan mengapa konflik di Ukraina bisa terjadi dan apa dampaknya terhadap kebijakan luar negeri negara-negara Eropa Timur lainnya.

1.5.2 KERANGKA PEMIKIRAN

Penulis menyajikan kerangka pikiran sebagai landasan berpikir untuk menuntun pembaca memahami secara singkat penjelasan penulis sebelum membaca penjelasan yang lebih mendalam di bab-bab berikutnya.

Pengaruh, berdasarkan KBBI, adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang.¹⁷ Pengaruh dalam kamus Bahasa Inggris yang berarti *Influence*, yang kurang lebih memiliki arti yang sama. *Sphere of Influence*, di dalam kaidah hubungan internasional, adalah klaim yang dilakukan oleh sebuah negara untuk secara eksklusif atau sepenuhnya mengontrol sebuah daerah asing.¹⁸ Dengan kata lain, negara tersebut memiliki hegemoni di dalam *Sphere of Influence* miliknya. Konsep ini lahir pada akhir abad ke 19 dimana para negara-negara *Great Powers* masing-masing memiliki control atas kebijakan-kebijakan negara-negara di wilayah pengaruhnya.¹⁹ *Sphere of Influence* memiliki batas ruang lingkup sehingga apabila ada negara lain yang mengintervensi *Sphere of Influence* suatu negara, maka konflik antar keduanya akan terjadi. Di dalam rivalitas AS-China, Asia Tenggara menjadi medan konflik antara China dan AS dalam memperebutkan hegemoni di kawasan Asia Tenggara. Hal ini tentu bukan yang diinginkan ASEAN, terutama oleh Indonesia yang tidak menyetujui hegemoni satu kekuatan di Asia Tenggara.

¹⁷ KBBI Online, *Pengaruh*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 melalui <http://kbbi.web.id/pengaruh>.

¹⁸ Encyclopedia Britanica, *Sphere of Influence: International Relations*, diakses pada tanggal 17 Oktober 2016 melalui <https://www.britannica.com/topic/sphere-of-influence>.

¹⁹ Ibid.

Teori konflik digunakan untuk menjelaskan rivalitas AS-China secara global yang sampai mengarahkan keduanya berkonflik di Laut China Selatan. Konflik adalah perselisihan antara dua orang/kelompok/negara yang didasarkan pada perbedaan kepentingan. Secara mudah konflik seringkali dilihat dengan kedua negara yang saling berdekatan atau berbatasan yang saling memperebutkan kekuasaan atas satu wilayah. Akan tetapi, dalam konflik sekarang ini konflik tidak harus selalu terjadi dengan dua negara yang bertetangga. Konflik bisa terjadi antara dua negara yang terpisah ribuan kilometer jauhnya. Pergesekan antara *sphere of influence* dapat juga menyebabkan konflik. Berdasarkan klarifikasi Holsti, pergesekan *sphere of influence* dapat diasumsikan sebagai konflik hak istimewa, karena *influence* suatu negara dapat memberikannya hak istimewa dalam mempengaruhi kebijakan luar negeri di wilayah yang bukan wilayah kedaulatannya.²⁰ Konflik hak istimewa juga menjadi penjelasan yang menyebabkan adanya konflik antara dua negara yang bahkan terpisah ribuan kilometer jauhnya.

Teori realisme dan neo-realisme menjadi dasar pendekatan untuk melihat bagaimana kebijakan luar negeri Indonesia menanggapi rivalitas AS dan China sebelum membahas kepada konsep *balance of threat*. Para realis percaya bahwa dunia itu tempat yang berbahaya, dimana setiap manusia akan saling menghancurkan satu sama lain. Sementara Neorealisme atau realisme struktural menjelaskan bahwa pengaruh-pengaruh luar yang menciptakan tindakan-tindakan

²⁰ K.J. Holsti, terjemahan Wawan Juanda, *Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis*, Binacipta, Bandung, 1992, hlm. 598.

dari suatu negara. Neorealisme melihat struktur dari sistem internasional, terutama dalam hal power.²¹ Baginya, tindakan aktor-aktor hubungan internasional dipengaruhi oleh struktur.

Neorealisme Waltz percaya bahwa setiap negara dihadapkan pada isu yang sama, yaitu bagaimana ia menentukan kebijakan luar negerinya berdasarkan faktor-faktor luar yang mempengaruhinya. Artinya, pemimpin negara adalah tawanan dari struktur internasional yang menyajikan opsi-opsi yang bisa dia putuskan.²² Keputusan apa yang ditentukan oleh pemimpin negara dipengaruhi oleh kemampuannya tersendiri.²³ Sehingga tak mungkin ada ruang bebas di dalam pembentukan kebijakan luar negeri tanpa melihat struktur dari sistem internasional yang mereka hadapi.

Neorealisme menjelaskan bahwa *balance of power* tercipta akibat adanya kekuatan luar yang mengancam negara. Kenneth Waltz menyatakan bahwa *balance of power* terbentuk apabila dua persyaratan terpenuhi: yakni susunan politik internasional yang anarkis dan dipenuhi oleh unit-unit yang ingin bertahan hidup.²⁴

Balance of Power merupakan sebuah konsep yang membahas perihal penyeimbangan kekuatan di dalam sistem internasional. *Balance of Power* memiliki banyak pengertian oleh banyak pemikir hubungan internasional. Glenn Snyder

²¹ Jackson, Robert & Georg Sørensen, *Introduction to International Relations: Theories & Approaches*, edisi keempat, Oxford University Press, hal 74.

²² Ibid, hlm. 75

²³ Ibid.

²⁴ Waltz, Kenneth N., 1979, *Theory of International Politics*, Addison-Wesley, Reading, MA, hlm.121

menyebut *balance of power* sebagai inti dari hubungan internasional.²⁵ Sejarahwan membuktikan bahwa *balance of power* adalah konsep yang sudah lama digunakan oleh berbagai negara di dunia dari waktu ke waktu. Mereka mengambil sumber dari Yunani kuno dan China kuno, bahkan pada era Renaissance sampai ke abad 18 dan 19.²⁶ Morgenthau mengatakan *balance of power* adalah “*iron of politics*”.²⁷ Henry Kissinger mengatakan *balance of power* adalah seni yang diterapkan oleh pemimpin negara.²⁸

Secara tradisional, teori *balance of power* memandang negara selalu mencari upaya untuk bertahan hidup sebagai entitas yang berdaulat di tengah sistem internasional yang anarkis.²⁹ Negara selalu mencari power dengan tujuan untuk selamat dari dimangsa oleh negara lain. Sehingga kompetisi dalam upaya memperebutkan power merupakan hal yang alami.³⁰ Kompetisi ini tidak adil mengingat perbandingan power setiap negara berbeda-beda. Bagi negara yang mampu bertahan sendiri dengan power yang dia miliki bisa saja memilih melakukan penyeimbangan secara internal dengan menambah aset militer negaranya. Tetapi, bagaimana dengan negara-negara yang tidak memiliki power yang demikian? Pertama, negara kecil dapat menjadi penginvasi yang menguasai negara-negara

²⁵ Snyder, Glenn, *Balance of Power in the Missile Age*, *Journal of International Affairs* 14, 1961, hlm. 21-24.

²⁶ Levy, Jack, *What do Great Power Balance against and When?*, di dalam buku *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st century*, oleh T.V. Paul, James J. Wirtz, Michael Fortmann, Stanford, 2004, hlm. 29

²⁷ Morgenthau, Hans, *Politics Among Nations*, edisi ke 4, Knopf, New York, 1967.

²⁸ Kissinger, Henry A., *A World Restored: Metternich, Castlereagh, and the Problems of Peace*, Houghton Mifflin, Boston, 1973.

²⁹ Paul, T.V., *Introduction: The Enduring Axioms of Balance of Power Theory and Their Contemporary Relevance*, di dalam buku *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st century*, oleh T.V. Paul, James J. Wirtz, Michael Fortmann, Stanford, 2004, hlm. 4-5

³⁰ Ibid.

yang lebih lemah dengan tujuan untuk mengamankan dirinya.³¹ Atau kedua, negara-negara seperti ini melakukan perkumpulan atau aliansi yang ditujukan untuk mengimbangi ancaman bersama mereka secara bersama-sama. Lebih jauh, negara-negara kecil ini dapat juga mengundang negara besar lain untuk turut serta dalam koalisi mereka menghadapi ancaman bersama mereka.³² Dalam mengukur *power*, Morgenthau mengatakan bahwa sumber utama power diukur dari geografi, politik, ekonomi, dan sosial-kultural, termasuk juga kualitas penduduk, pemerintahan, diplomasi, dan militer.³³ Secara umum, *power* ditunjukkan di seputar bidang militer, politik, ekonomi antar negara-negara.³⁴ Ketiga bidang tersebut seringkali memainkan kartu penting di dalam memproyeksikan *power* sebuah negara kepada dunia.

Teori *Balance of Power* menilai bahwa dengan memperhatikan kekuatan fisik sebuah negara maka negara tersebut memiliki power yang besar dan dipastikan menjadi ancaman besar. Teori ini menjadi tidak sesuai dengan kondisi di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Dimana negara-negara di Asia Tenggara cenderung tidak melakukan *balancing* terhadap China walaupun China bisa dianggap sebagai ancaman bagi mereka. Patut diketahui semenjak abad ke-21, terjadi perdebatan di dalam penggunaan teori hubungan internasional. Teori-teori ini didasarkan pada pengalaman hubungan internasional di Eropa dan Amerika

³¹ Ibid.

³² Ibid.

³³ Morgenthau, *Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace*, New York, 1985, hlm. 115-184.

³⁴ Loc. Cit., Snyder, *Balance of Power*.

Utara, bukan Asia.³⁵ Huntington, menyatakan budaya masing-masing bangsa yang menentukan dinamika hubungan antar negara.³⁶ Perbedaan pengalaman sejarah dan budaya antara budaya barat dan timur menciptakan perbedaan cara menanggapi sebuah negara.

Dalam kasus di Asia Tenggara kecenderungan untuk tidak melakukan *balancing* terhadap kebangkitan China sebagai superpower menjadikan teori *balance of power* menjadi perdebatan antara para pemikir hubungan internasional. Kang menyatakan karena Asia mengikuti sejarahnya sendiri, dimana negara-negara di Asia kembali ke struktur hierarkisnya, yang berarti negara-negara di Asia melakukan bandwagoning ke China.³⁷ Daniel Novotny melihat bahwa walaupun ada pendekatan teoritis, pendekatan tersebut harus bersifat fleksibel dengan keadaan di Asia.³⁸ Kondisi hubungan internasional di Asia Tenggara menyebabkan harus adanya pendekatan tidak kaku dan adaptatif terhadap lingkungan politik internasional di Asia, khususnya Asia Tenggara. Dari pemikiran ini maka teori *balance of threat* muncul untuk memperkuat argument mengenai situasi yang terjadi di Asia.

Sebelum berbicara mengenai *balance of threat*, harus dimengerti apa yang dimaksud sebagai *threat* (ancaman). Penggunaan konsep *threat* ditujukan untuk

³⁵ Philpott, Simon, *Rethinking Indonesia: Postcolonial Theory, Authoritarianism, and identity*, St. Martin's Press, New York, 2000, hlm. 64-65; Kang, David C., *Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks*, *International Security* 27, no. 4, 2003, hlm. 61.

³⁶ Huntington, Samuel P., *The Clash of Civilizations?*, *Foreign Affairs* 72, no. 3, 1993, hlm. 22.

³⁷ Kang, David C., *Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks*, MIT Press, Vol. 27, No. 4, 2003, hlm. 61.

³⁸ Novotny, Daniel, *Torn between the America and China: Elite Perceptions and Indonesian Foreign Policy*, ISEAS, Singapura, 2010, hlm. 32

memperkecil cakupan mengenai tolak ukur penelitian ini mengingat konsep *power* masih luas dan masih kurang mampu menjelaskan fenomena yang terjadi di Asia Tenggara. Novotny menjelaskan dalam risetnya mengenai politik luar negeri Indonesia bahwa *threat* adalah ukuran di mana power sebuah negara bisa dianggap sebagai ancaman oleh elit politik dari negara lain.³⁹

Teori *Balance of Threat* menentang anggapan dari teori *Balance of Power*. Teori *Balance of Power* menyebutkan bahwa negara akan selalu mengimbangi kekuatan dari negara lain yang lebih kuat darinya. Tetapi *balance of power* hanya melihat power dan tak mampu menjelaskan mengapa ada negara yang tidak takut dengan negara yang memiliki power yang besar. Dalam merespons kelemahan ini, Stephen M. Walt menganalisa kasus ini di dalam bukunya *Origins of Alliances*.⁴⁰ Dalam penelitiannya, Walt mengemukakan bahwa perbandingan antara kekuatan AS dan Uni Soviet pada era perang dingin sebenarnya tidak seimbang. Blok Barat lebih kuat dari blok Timur. Tetapi, mengapa banyak negara-negara tidak takut dengan kekuatan AS. Lalu dia mengambil contoh kasus pembentukan aliansi di Timur Tengah, dimana mempertanyakan mengapa negara-negara Timur Tengah melakukan balancing saat menghadapi kehadiran superpower AS dan Uni Soviet dari tahun 1950-1970. Dari penelitian ini Walt menentang konsep *balance of power*, dan menjelaskan bahwa negara tidak melakukan balancing berdasarkan power, tetapi dari ancaman yang diberikan negara yang dia anggap mengancam. Negara

³⁹ Ibid.

⁴⁰ Walt, Stephen M., *The Origins of Alliances*, Cornell University Press, 1990

memilih sekutunya dengan tujuan melakukan balancing terhadap ancaman paling berbahaya.⁴¹ Menurut Walt, *threat* suatu negar diukur dari tiga hal, yakni:⁴²

1. Jarak jangkauan
2. Kemampuan ofensif
3. Tingkat agresivitas berdasarkan pandangan negara lain

Ketiga poin tersebut dibuktikan di dalam kebangkitan Amerika Serikat menjadi sebuah *superpower* tanpa hambatan serius pada abad ke-19 dan abad ke-20. Pertama, jarak jangkauan AS yang berada di seberang samudera tidak menjadi ancaman serius bagi para major powers di Eropa dan Asia. Kedua, kekuatan militer AS kalah dibandingkan dengan kekuatan militer Jerman atau Rusia / Uni Soviet. Ketiga, AS tidak bersikap agresif terhadap negara-negara Eropa daripada tindakan Uni Soviet yang hendak menyebarkan paham komunisme ke seluruh dunia.⁴³

Studi Kebijakan Luar Negeri (Foreign Policy Analysis) adalah studi yang mempelajari manajemen hubungan luar dan aktivitas antara negara-bangsa.⁴⁴ Kebijakan luar negeri (Foreign Policy) adalah suatu keharusan bagi sebuah negara untuk menjalin komunikasi dengan negara lain, bahkan dengan aktor internasional lainnya. Studi kebijakan luar negeri menjadi alat penting untuk mengetahui apa yang harus dilakukan di dalam penyusunan kebijakan luar negeri. Untuk dapat

⁴¹ Ibid., hlm. 263.

⁴² Ibid., hlm. 264

⁴³ Op. Cit., Novotny, hlm. 38-39.

⁴⁴ Op. Cit., Jackson, hlm. 226.

mengerti kebijakan luar negeri diterapkan beberapa pendekatan yang dapat membantu memahami kebijakan tersebut.

1. **Pendekatan tradisional (traditional approach)** melibatkan kebijakan luar negeri suatu negara yang didasarkan pada karakteristik negara tersebut. Faktor sejarah dan latar belakang, kepentingan nasional, dan situasi negara menjadi sumber pembahasan dalam pendekatan ini.
2. **Pendekatan komparatif (Comparative approach)** menggunakan teori sistematis dan pengumpulan beragam data dalam jumlah besar, lalu melakukan penjelasan terhadap tiap-tiap data yang dikumpulkan. Pendekatan ini juga menggunakan 'pre-theory' James Rosenau yang mana Rosenau mengidentifikasi data-data tersebut dalam bentuk klasifikasi antar masing-masing negara.
3. **Pendekatan struktur dan proses birokrasi (bureaucratic structures and processes approach)** berfokus pada struktur birokrasi yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dan bagaimana mereka menghadapi suatu permasalahan.
4. **Pendekatan kognitif dan psikologi (cognitive process and psychology)** menggunakan analisa terhadap kemampuan individu yang membuat keputusan.
5. **Pendekatan Multilevel, dan multidimensi (multilevel and multidimensional approach)** yaitu dengan menggunakan berbagai macam teori-teori dasar untuk menjelaskan politik luar negeri. Karena tidak mungkin hanya satu teori yang dapat menjelaskan keseluruhan dari kebijakan luar negeri.
6. **Pendekatan Sosial konstruktif (social constructive approach)** melibatkan teori konstruktivisme untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara. Menurut pendekatan ini, negara memiliki ciri khas tertentu dalam menyusun kebijakan luar

negerinya. Salah satu contohnya adalah kultur strategis (strategic culture) yang mencakup tradisi politik luar negeri suatu negara.⁴⁵

Tingkatan analisis digunakan untuk menjawab faktor-faktor apa saja yang membantu pembuatan keputusan kebijakan luar negeri. Terdapat tiga level analisis yang digunakan untuk melihat penerapan strategi di dalam kebijakan luar negeri.

1. Level Sistemik (Systemic level) yaitu berfokus pada pembagian power kepada negara-negara, dan interdependensi politik dan ekonomi
2. Level negara-bangsa (Nation-state level) dengan melihat pada model pemerintahan, struktur birokrasi negara, dan hubungannya dengan negara lain.
3. Level pembuat keputusan (Level of individual decision maker) yakni berfokus pada kepribadian pembuat keputusan, baik itu pengalaman, pola pikir, dan kepercayaannya.⁴⁶

Dalam penulisan penelitian ini, analisis politik luar negeri Indonesia menjadi pusat perhatian untuk menemukan opsi-opsi yang Indonesia dapat lakukan dalam memformulasikan kebijakan luar negeri berikutnya. Formulasi politik luar negeri Indonesia bermula pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perdebatan mengenai bagaimana doktrin politik luar negeri Indonesia diluruskan oleh Mohammad Hatta dalam pidatonya “Mendayung diantara dua karang”. Olehnya,

⁴⁵ Ibid., hlm. 227-231

⁴⁶ Ibid.

dasar-dasar pokok politik luar negeri Indonesia tertanam.⁴⁷ Hatta menjelaskan politik luar negeri Indonesia berbasis pada empat poin penting.

1. Menjalankan politik luar negeri harus didasarkan pada ideologi negara, yaitu Pancasila.
2. Menjaga kepentingan negara sesuai dengan yang tertulis di dalam konstitusi.
3. Mencapai kepentingan nasional Indonesia harus melalui kebijakan yang independen
4. Penerapan kebijakan luar negeri harus bersifat pragmatis, yakni dibentuk sesuai kepentingan nasional Indonesia dan dilaksanakan dengan melihat situasi dan fakta di lapangan.⁴⁸

Indonesia dan ASEAN memiliki hubungan penting dalam upaya Indonesia menjalankan politik luar negerinya. Bagi Indonesia, politik luar negeri Indonesia untuk skala global disalurkan melalui ASEAN. Karena Indonesia memiliki dua faktor penting yang memungkinkannya melakukan demikian: satu, status Indonesia sebagai kekuatan regional dan kedua, struktur politik luar negeri Indonesia yang mengharuskannya memiliki pengaruh regional sebelum berperan secara internasional.⁴⁹ Oleh karena itu, ASEAN merupakan kendaraan penting bagi Indonesia untuk memimpin kawasan Asia Tenggara dan menjamin negara-negara tetangganya yang lebih kecil bahwa eksistensi Indonesia tidak mengancam.⁵⁰

⁴⁷ Widjaja, A.W., *Indonesia, Asia Afrika, Non-Blok: Politik Babas Aktif*, Bina Aksara, Jakarta, 1986, hlm. 15.

⁴⁸ Hatta, Mohammad, *Kumpulan Pidato*, Yayasan Idayu, Jakarta, 1981, hlm. 446

⁴⁹ Acharya, Amitav, *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*, World Scientific, Singapore, Agustus 2014, hlm. 49

⁵⁰ Murphy, Ann. M., *Indonesia Returns to the International Stage: Good News for the United States*, di dalam *Orbis*, volume 53, Januari 2009, oleh Elsevier, hlm. 65-79.

Sehingga, politik luar negeri Indonesia dapat digambarkan dalam bentuk “Lingkaran Konsentris”.

*The first concentric circle is with Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) which becomes Indonesia’s prime pillar in carrying out its foreign policies. In the second concentric circle lies ASEAN + 3 (Japan, China, South Korea). Outside of those circles, Indonesia also builds an intensive cooperation with the USA and European Union which serve as Indonesia’s main economic partners. In the third concentric circle lie like-minded developing countries.*⁵¹

Maka dari itu, apabila ada gangguan terhadap ASEAN akan berdampak pada kapabilitas politik luar negeri Indonesia. Rene L. Pattiradjawane bahkan menyebutkan bahwa ASEAN adalah Indonesia dan Indonesia adalah ASEAN.⁵² Ini menjadi alasan utama mengapa Indonesia sangat aktif dalam aktivitas ASEAN dan selalu ikut terlibat dalam membentuk citra ASEAN di tingkat global.

Dalam upaya melakukan *balancing* antara AS dan China, Indonesia mengambil konsep “mendayung diantara dua karang”. Sebelumnya banyak yang mempertanyakan apa pilihan Indonesia dalam menanggapi konflik antara AS dan China di Laut China Selatan. Ross menyatakan bahwa dengan perebutan influence di Asia Tenggara menyebabkan kawasan itu terpecah menjadi dua dengan daerah kontinental Asia Tenggara berpihak ke China dan daerah maritime berpihak kepada Amerika Serikat.⁵³ Pemikiran ini ditentang dengan anggapan bahwa negara-negara

⁵¹ Ibid., Acharya, hlm. 49

⁵² Pattiradjawane, Rene L., *ASEAN Is Indonesia, Indonesia Is ASEAN*, di dalam Kompas, Jakarta, 4 Agustus 2010

⁵³ Ross, Robert S., *The Geography of Peace*, International Security 23, no. 4, 1999, hlm. 84-86

ASEAN tidak memilih Washington atau Beijing, tetapi berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keuntungan dari keduanya. Novotny menyebut apa yang dilakukan negara-negara ASEAN, termasuk Indonesia dengan konsep “mendayung diantara dua karang” sama dengan *hedging strategy*.⁵⁴ Christofferson menyebutkan bahwa ketidakpercayaan para pemimpin di Asia Tenggara akan para *great powers*, maka mereka memutuskan untuk mengatur keseimbangan antara pengaruh AS dan pengaruh China.⁵⁵

Hedging mengambil istilah dari dunia keuangan yang mana adalah strategi yang digunakan untuk meminimalisir kerugian dalam usaha keuangan apabila terjadi kejadian-kejadian yang merugikan seperti krisis keuangan.⁵⁶ Di Dalam hubungan internasional, *Hedging* adalah upaya negara-negara kecil menghadapi negara-negara yang memiliki kapasitas power yang jauh lebih besar darinya. Tujuan dari hedging adalah mencari jalan tengah di antara konflik dua kekuatan besar.⁵⁷ Leah Sherwood menyatakan negara-negara kecil memiliki opsi-opsi kebijakan yang sedikit. Ukurannya yang kecil tidak memungkinkan untuk memiliki kekuatan dan pengaruh yang kuat untuk menjamin keselamatan negaranya.⁵⁸ Kebanyakan negara-negara kecil ikut serta dalam organisasi-organisasi

⁵⁴ Op. Cit., Novotny, hlm. 304

⁵⁵ Christofferson, Gaye, *The Role of East Asia in Sino-U.S. Relations*, Asian Survey 42, no. 3, 2002.

⁵⁶ BusinessDictionary, *Hedging*, <http://www.businessdictionary.com/definition/hedging.html>, diakses pada tanggal 8 Mei 2017.

⁵⁷ Tessman, Brock dan Wojtek Wolfe, *Great Powers And Strategic Hedging: The Case of Chinese Energy Security Strategy*, International Studies Review, edisi ke 2, Juni 2011, hlm. 216.

⁵⁸ Sherwood, Leah, *Small State's Strategic Hedging for Security and Influence*, Trendsinstitution, September 2016, <http://trendsinstitution.org/small-states-strategic-hedging-for-security-and-influence/>, diakses pada tanggal 7 April 2017.

internasional atau aliansi-aliansi untuk menutupi kekurangan tersebut.⁵⁹ Strategi Balancing adalah hal yang paling umum diketahui, dimana negara kecil akan mencoba mengimbangi ancaman dari negara lain melalui *hard balancing*, yakni meningkatkan kekuatan militer atau *soft balancing* dengan jalur diplomasi. Bandwagoning dilakukan dengan bergabung dengan salah satu kekuatan besar. Sementara Buckpassing adalah kebijakan netral yang berupaya untuk tidak terlibat sama sekali dalam politik luar negeri. Tetapi *hedging* berbeda dari semua itu. Hedging dianggap sebagai metode ‘cerdas’ untuk negara-negara kecil untuk menentukan kebijakan luar negerinya.

Dia mengambil contoh dari negara Oman, sebuah negara di ujung tenggara semenanjung Arab, dimana negara tersebut melakukan hedging diantara Saudi Arabia, Iran, dan kekuatan eksternal seperti AS dan Inggris untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Oman beraliansi dengan Saudi Arabia dan AS tetapi juga bekerja sama dengan Tehran. Di dalam Gulf Cooperation Council (GCC), Oman bisa menentukan kebijakan luar negerinya secara bebas, bahkan berbeda dari yang disepakati oleh GCC. Sherwood menyimpulkan bahwa kebijakan luar negeri Oman didasarkan pada pengalaman Kesultanan Oman yang telah hidup selama 250 tahun berinteraksi dengan Inggris, Iran, Saudi Arabia, AS, dan negara-negara lain di sekitarnya. negara yang melakukan *hedging* akan mencoba mencari jalan tengah.

⁵⁹ Mehmetick, H., *If you are not big enough, pick a strategy: Bandwagoning, Balancing, Hedging*, International Association for Political Science Students, <http://www.iapss.org/2015/04/29/if-you-are-not-big-enough-pick-a-strategy-bandwagoning-balancing-hedging/>, diakses pada tanggal 7 Mei 2017.

Strategi yang diterapkan dari contoh diatas ini menjadi contoh bahwa *hedging* ditujukan untuk memenuhi kepentingan nasional sebuah negara dengan memanfaatkan rivalitas dua kekuatan besar. Sehingga, penulis juga akan mengidentifikasi proses *hedging* yang hendak dilakukan Indonesia terhadap China dan Indonesia terkait konflik Laut China Selatan

1.6 METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai acuan untuk memahami dan menjelaskan penelitian dari permasalahan yang dipaparkan. Metode penelitian kualitatif dituntut menggunakan pertanyaan dan prosedur dalam menjelaskan. Data yang diperoleh dari penulis akan dianalisis dan dikelola sesuai dengan interpretasi penulis dari hasil penelitiannya.⁶⁰ Metode penelitian menjadi pilihan penulis karena memiliki ruang yang luas untuk menentukan teknik penelitian yang bagi penulis untuk menentukan teknik penelitian dari masalah yang dipaparkan dan juga memperjelas penulis juga pembaca mengenai asumsi penulis yang akan mempengaruhi proses riset dan hasil akhir.⁶¹ Selain itu, metode ini memiliki berbagai opsi yang membantu penulis bertanya dan menjawab berbagai isu-isu politik sosial, termasuk juga yang dicantumkan penulis, dalam bentuk deskriptif dan eksplanatif.⁶²

⁶⁰ Creswell, John W., *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, edisi ketiga, SAGE Publications, hal. 4.

⁶¹ Hesse-Biber, Sharlene N. & Patricia Leavy, *Approaches to Qualitative Research: a reader on theory and practice*, Oxford University Press, New York, hal. 13.

⁶² Ibid.

Penggunaan metode penelitian kualitatif memerlukan cara penelitian itu dibuat dan disajikan. Penulis hendak menggunakan tipe studi kasus. Tipe studi kasus mengambil data dari kejadian, aktivitas, atau proses yang terjadi secara mendalam dari satu kejadian tertentu.⁶³ Teknik ini melihat kejadian yang ingin diteliti secara keseluruhan kasus-kasus yang terjadi selama kejadian yang disebutkan berlangsung.

Tipe studi kasus dipilih karena memiliki ruang penelitian yang lebih luas. Tipe ini mengajak pembaca untuk memahami sebuah kasus dari analisis penulis terhadap penelitiannya.⁶⁴ Penulis memilih studi kasus untuk mengamati topik diatas karena merasa dapat dengan mudah membuat penelitian dengan lebih leluasa dan sesuai dengan cara analisis penulis. Metode studi kepustakaan juga menjadi metode pilihan penulis. Metode ini menggunakan sumber-sumber buku penelitian sebelumnya yang membantu menambah sumber referensi penulis.

Sumber-sumber penulis akan diambil dari sumber internet, dan studi kepustakaan di perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan atau perpustakaan umum dan dokumentasi yang berkaitan dengan tema yang diakses dari buku, jurnal, dan juga berita.

⁶³ Op. Cit., Creswell, hal. 13.

⁶⁴ Stake, Robert E., Case Studies, di dalam buku Handbook of Qualitative Research, karangan Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln, SAGE Publications, London, https://elearning.uky.edu/bbcswebdav/pid-3033959-dt-content-rid-19157540_2/courses/AAD750-DEV-201499/PDF%20Documents/Case%20studies_R.E.Stake.pdf, diakses pada tanggal 18 Febuari 2016.

1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II. Hubungan AS dan China di dalam Persaingan Global

Bab ini akan mencoba menjelaskan rivalitas AS dan China secara lebih mendalam. Pertama, akan dijelaskan latar belakang rivalitas keduanya. Kedua, akan dijelaskan mengenai Laut China Selatan dan bagaimana konflik ini menjadi bagian dari konflik global antara AS dan China. Ketiga, akan dijelaskan masing-masing perspektif kedua negara terkait konflik Laut China Selatan. Terakhir, disajikan keputusan-keputusan masing-masing negara yang berkaitan dengan Laut China Selatan.

Bab III. Posisi Indonesia di dalam ASEAN dan persepektif Indonesia terhadap AS dan China

Bab ini akan menjelaskan Indonesia sebagai kekuatan penting di Asia Tenggara. Pandangan Indonesia terhadap AS dan juga pandangan Indonesia terhadap China juga akan dijelaskan. Termasuk juga latar belakang pandangan terhadap kedua negara besar tersebut.

Bab IV. Dampak Rivalitas AS-China di Laut China Selatan terhadap kebijakan luar negeri Indonesia

Bab ini akan membahas dampak konflik Laut China Selatan terhadap Indonesia. Dijelaskan bagaimana kejadian-kejadian di Laut China Selatan yang mempengaruhi Indonesia. Juga akan dibahas bagaimana Indonesia merespons terhadap konflik ini dan bagaimana respons Indonesia menghadapi persaingan tersebut.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini akan menjadi rangkuman penutup yang menyimpulkan kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia dan maksud dari tujuan kebijakan-kebijakan tersebut.